

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah executing* antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta dengan mengacu kepada pedoman yang berlaku. Sebagai bagian dari suatu komitmen BPRS Dana Hidayatullah, setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun Kebijakan Umum Penyaluran Dana Bank sendiri yang didasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat. Setiap pejabat atau petugas dari bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana.
2. Transparansi bagi hasil dalam akad *mudharabah muqayyadah executing* yang dilakukan antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat adalah dengan adanya laporan dari BMT Shohabat setiap bulannya kepada BPRS Dana Hidayatullah. Laporan tersebut diantaranya memuat mengenai keuntungan yang diperoleh dari *murabahah* tersebut dan lancar atau tidaknya angsuran dari nasabah BMT Shohabat.
3. Tindakan yang dilakukan oleh Bank jika terjadi indikasi manipulasi data oleh pihak *mudharib* yakni apabila manipulasi data tersebut masih masuk dalam

perhitungan atau anggurannya lancar maka tidak dipermasalahan. Namun jika manipulasi tersebut menimbulkan permasalahan atau sengketa maka pihak BPRS Dana Hidayatullah akan melakukan dialog atau musyawarah untuk mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Apabila setelah dilakukan musyawarah tetap tidak menemukan jalan keluarnya, maka penyelesaiannya kemudian dilakukan dengan jalan Arbitrase.

B. Saran

1. Syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BPRS Dana Hidayatullah seharusnya dibuat dengan memperhatikan prinsip bagi hasil sehingga sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah executing* dapat diterapkan.
2. BPRS Dana Hidayatullah dalam menerima laporan dari BMT Shohabat, sebagai wujud dari transparansi bagi hasil, seharusnya tidak hanya menerima begitu saja laporan yang diberikan, namun BPRS Dana Hidayatullah juga harus melakukan kroscek dengan data yang ada di lapangan sehingga dapat meminimalisir adanya indikasi manipulasi data.